

# PROSEDUR PERENCANAAN DAN ANGGARAN KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK – JAKARTA UTARA

Albert M.E Wijaya  
[albertsimatupang16@gmail.com](mailto:albertsimatupang16@gmail.com)

Emerald G.M. Tobing  
[emerald.tobing@yahoo.com](mailto:emerald.tobing@yahoo.com)

## ABSTRACT

*Any company or organization that is established must have a goal to be achieved by effective and efficient manner. It also applies to all organizations jenis state as engaged in the political field, the economic field, the field of Business, Social and Cultural field - like Pendidikan and Health - a nonprofit organization, Society of Social Institutions and Religious environment even though. Economic development is carried out by a country always followed by the development aspect that continues to increase rapidly and rumit. Seiring with these developments, the various efforts undertaken by any institution or company to improve its performance. In an agency for planning and budgeting becomes important to achieve the goals and objectives of effective and efficient so as to produce the expected absorption or improve performance to be achieved. However, the planning and budget there are some problems encountered. As Realization / Biodegradable DIPA 2015 budget year. House of Representatives (DPR) to understand the proposed Budget Ceiling MoT for 2015 amounted Rp.51,605,867,000 but what happens during the running of the fiscal year 2015 there were problems experienced in personnel expenditure report with a shortage fee. The results of the practice of field work carried out showed that the procedures of planning and budget at the main kesyahbandaran office still need to be evaluated to support the performance of the office as a public service.*

*Keywords: Planning, Procedure, Budget*

## 1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara selalu diikuti dengan perkembangan aspek yang terus meningkat pesat dan rumit. Seiring dengan perkembangan tersebut maka berbagai upaya dilakukan oleh setiap lembaga ataupun perusahaan untuk membenahi kinerjanya. Hal ini turut berdampak pada instansi-instansi pemerintah sebagai lembaga pemerintah yang bertujuan meningkatkan kinerja untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang semakin pesat itu agar setiap target dan tujuan dapat terlaksana dengan baik sehingga memperkecil resiko kesalahan yang dapat memperlambat kinerja.

Penyusunan anggaran merupakan siklus penting bagi perusahaan dan lembaga yaitu untuk membantu pelaksanaan dalam merencanakan kegiatan dan memberikan gambaran awal seberapa besar dana yang akan dikeluarkan untuk mewujudkan kegiatan tersebut yang dimotori oleh pusat pertanggungjawaban sehingga dapat meminimalisir penyimpangan. Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, setiap organisasi memerlukan perencanaan dan pengendalian kegiatan kerja yang baik.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Pengertian Perencanaan

Perencanaan (planning), yaitu menyusun rencana sebagai dasar pedoman kerja. Perencanaan ialah pengambilan keputusan tentang sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, alat kerja, dan metode kerja yang digunakan, serta sumber daya manusia yang melakukan. Perencanaan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang.

Menurut Erly (2001:2)

Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Definisi perencanaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan menggunakan beberapa aspek yakni :

1. Penentuan tujuan yang akan dicapai.
2. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.
3. Usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar yang dipilih.

Selain aspek tersebut, perencanaan juga mempunyai manfaat bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien.
2. Dapat mengatakan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin.
3. Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman.
4. Dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

### b. Pengertian Anggaran

Proses penyusunan anggaran sering kali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Misalnya, pidato presiden setiap bulan agustus tentang Nota keuangan dan Rancangan APBN selalu menjadi indikator perekonomian Negara setahun ke depan. Bahkan, tidak jarang APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan, baik oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi. Jika demikian, apakah sebenarnya anggaran itu? Bagaimana seluk-beluknya?

Menurut Freeman dan Shoulders (2003) "*Budgeting is the process of allocating scarce resources to unlimited demands, and a budget is a dollars-and-cents plan of operation for a specific period of time.*"

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa penganggaran merupakan proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas (*unlimited demands*).” Sementara itu, anggaran merupakan rencana kerja dalam suatu periode yang ditetapkan dalam satuan mata uang.

Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan hal hal berikut.

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber yang menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut.

## 3. Pembahasan

## A. Hasil Praktik Kerja Lapangan

### 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Sejak diterbitkannya peraturan pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA K/L). dimana RKA K/L disusun berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh kementerian keuangan dengan mengacu pada rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA K/L).

Maka perlu dibuat RKA K/L yang mana data didukung untuk penyusunan RKA K/L harus di lengkapi oleh para kuasa kuasa pengguna anggaran sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

RKA K/L disusun berdasarkan:

- a. Pagu alokasi anggaran K/L yang ditetapkan oleh menteri keuangan
- b. Rencana kerja kementerian negara/lembaga (Renja K/L)
- c. Rencana kerja pemerintah hasil kesepakatan pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN
- d. Standar biaya
- e. Kebijakan pemerintah lainnya

### 2. Pendekatan Penyusunan Anggaran

Sesuai amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, penyusunan anggaran oleh kementerian/lembaga mengacu kepada tiga pilar sistem penganggaran yaitu;

- a. Pendekatan penganggaran terpadu
- b. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja
- c. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah

### 3. Uang Persediaan

Uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daurulang(*revolving*), kemudian diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari dan tidak dapat dilakukan pembayaran langsung. Alur pengajuan Uang Persediaan (UP) yaitu membuat anggaran yang telah di estimasikan kemudian mengajukan Surat Perintah Membayar.

Ada dua dana Uang Persediaan (UP) kementerian yaitu;

- a. Rupiah Murni (RM), dimana dana tersebut dihasilkan dari;
  - 1) Kementerian keuangan, dan
  - 2) Pajak seluruh warga indonesia (APBN)
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana dana tersebut berasal dari PNBP jasa transportasi laut pada direktorat jendral perhubungan laut. Kemudian diserahkan kepada negara yang dikelola kementerian keuangan dan dialokasikan kembali kepada departemen perhubungan.

Berdasarkan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia No. 518/KMK.06/2002 pada tanggal 17 desember 2002 tentang penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan sebagian dana yang berasal dari jasa transportasi laut pada dirjen perhubungan laut.

### 4. Jenis belanja yang terdapat di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok – Jakarta Utara

Terdapat tiga jenis belanja yang terdapat pada kantor kesyahbandaran utama yaitusebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
- b. Belanja barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- c. Belanja modal, merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

### Permasalahan

Dalam suatu instansi untuk menyusun perencanaan dan anggaran menjadi hal yang penting untuk mencapai sasaran dan tujuan yang efektif dan efisiensi sehingga menghasilkan daya serap yang di harapkan atau meningkatkan kinerja yang ingin dicapai. Namun dalam melakukan perencanaan dan anggaran terdapat beberapa masalah yang dialami. Mulai dari

1. Permasalahan dalam penerapan penganggaran dengan kerangka pengeluaran jangka menengah yang tidak sesuai dengan perencanaan yang di buat.
2. Tidak sesuainya harga pasar dengan harga ketentuan maksimal yang ditetapkan oleh kementerian terkait.
3. Realisasi/Daya DIPA tahun anggaran 2015 yang tidak teralisasi dengan baik.

### Pemecahan Masalah

1. Penulis telah mengamati masalah yang terjadi di kantor kesyahbandaran utama menurut penulis seharusnya kantor melakukan perhitungan yang berdasarkan survey dalam melakukan perencanaan dan anggaran yang akan dibuat sebelum diajukan kepada kantor pusat.
2. Menurut penulis kementerian perhubungan dengan kementerian keuangan menetapkan harga dengan sesuai standar biaya khusus per program kegiatan yang dapat teruur secara jelas dan akurat.
3. Dalam hal menyelesaikan masalah tersebut penulis berpendapat untuk menggunakan biaya yang tidak terpakai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditetapkan.

## 4. Kesimpulan

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disusun berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh kementerian keuangan dengan mengacu pada rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA K/L). Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, kementerian negara/lembaga berkewajiban menyusun rencana kerja (Renja) secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Maka perlu dibuat RKA K/L yang mana data didukung untuk penyusunan RKA K/L harus di lengkapi oleh para kuasa kuasa pengguna anggaran sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
2. Sesuai amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, penyusunan anggaran oleh kementerian/lembaga mengacu kepada tiga pilar sistem penganggaran yaitu;
  - d. Pendekatan penganggaran terpadu
  - e. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja
  - f. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengahPelaksanaan Anggaran (DIPA) yang juga merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersifat tahunan serta mempunyai keterkaitan erat
3. Uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daurulang(*revolving*), kemudian diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari dan tidak dapat dilakukan pembayaran langsung. Alur pengajuan Uang Persediaan (UP) yaitu membuat anggaran yang telah di estimasikan kemudian mengajukan Surat Perintah Membayar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deddi Hertanti, Ayuningtyas, 2010, Akuntansi Sektor Publik, Edisi ke Dua Salemba Empat, Jakarta.
- George H. Bodnar, William S. Hopwood, 2003, *Sistem Informasi Akuntansi*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Indra Bastian, 2011, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi ke Dua, Salemba Empat, Jakarta.
- Indrajit, 2001, *Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object*, Bandung.
- Jogianto, HM, 2005, *Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 518/KMK.06/2002 pada tanggal 17 Desember 2002 tentang penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Mardi, 2014, *Sistem Informasi Akuntansi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi, Edisi ke Tiga*, Salemba Empat, Jakarta.
- Narko, 2007, *Sistem Akuntansi*, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA K/L).
- Sutabri, Tata, 2007, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, *Tentang Keuangan Negara*